

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Lelang ERP Dibatalkan

JAKARTA - Secara tiba-tiba, lelang proyek jalan berbayar atau Elektronik Road Pricing (ERP) dibatalkan pihak Dinas Perhubungan DKI. Alasannya, pihak dinas terkait masih menunggu ilegal opini dari pihak Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Yang dicoret pada APBD tahun 2019 adalah lelang ERP. Itu disebabkan kami masih menunggu rekomendasi pihak penegak hukum," ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Selasa (10/9/2019).

Syafrin menambahkan, untuk anggaran yang sudah dicoret itu telah dialokasikan di Unit

Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan setempat. Dalam situs yang ada di apbd.jakarta.go.id total anggaran pengelola sistim jalan berbayar sebesar Rp 40,8 miliar.

Semula semua anggaran itu untuk kebutuhan berbagai kegiatan ■

Meski begitu, kata Syafrin seluruh alokasi anggaran yang gagal diserap maka akan diajukan kembali di tahun anggaran 2020. "Tapi belum final berapa anggarannya, tapi kita ajukan lagi tahun depan," kata dia.

Salah satunya, sambung dia, untuk kembali melakukan kajian ulang lelang proyek ERP. Hal itu dilakukan sesuai

dengan petunjuk dari pihak Kejaksaan Agung. "Dalam legal opini yang diberikan Kejagung, kami akan kaji ulang terhadap dokumen yang sudah ada," imbuh dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, Pemprov DKI Jakarta akan melelang ulang proyek ERP. Pemprov DKI melakukan itu untuk mengikuti pendapat hukum Kejagung.

Rencananya, Pemprov DKI membahas penggunaan teknologi yang paling tepat

untuk ERP bersama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya, ERP yang diterapkan di Jakarta nantinya akan menggunakan teknologi terbaru.

Mengomentari hal itu, Pengamat Perkotaan Yayat Supriatna mengatakan, pembatalan lelang itu seharusnya dicari kelemahannya. Apakah lemah secara hukum atau ada yang lain. "Jadi ketahuan dimana letak kelemahannya, sehingga lelang terus berjalan," kata dia, Selasa (10/9/2019).

Yayat menambahkan, setidaknya ada basis data dari pihak kepolisian untuk bisa mengimplementasikan kebijakan ERP. Karena perangkatnya bukan hanya aturan hukum saja, melainkan polemik setelah diterapkannya aturan tersebut. "Siap atau tidak siap, Pemprov DKI seharusnya sudah matang dari awal," pungkask dia. (dny)